LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghargaan dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang telah menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk guna memberikan penjelasan secara komprehensive mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk pembangunan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Nganjuk, 17 Januari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK



NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pemerintah wajib untuk lebih *aware* terhadap isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Isu-isu strategis yang muncul dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhubungan dengan peningkatan jumlah akseptor KB Baru dan Aktif dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui kegiatan Roadshow GenRe Millenial ke Satuan Pendidikan seperti SMA, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren dan Lembaga Sosial/Kemasyarakatan secara berkala yang dilaksanakan bersama Ikatan Generasi Berencana Anjuk Ladang (IGRAL) yaitu wadah dari Generasi Berencana (GENRE), Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta optimalisasi Pembinaan dan Pelatihan bagi Akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA Isu-isu strategis tersebut menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Dengan begitu Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berjalan optimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

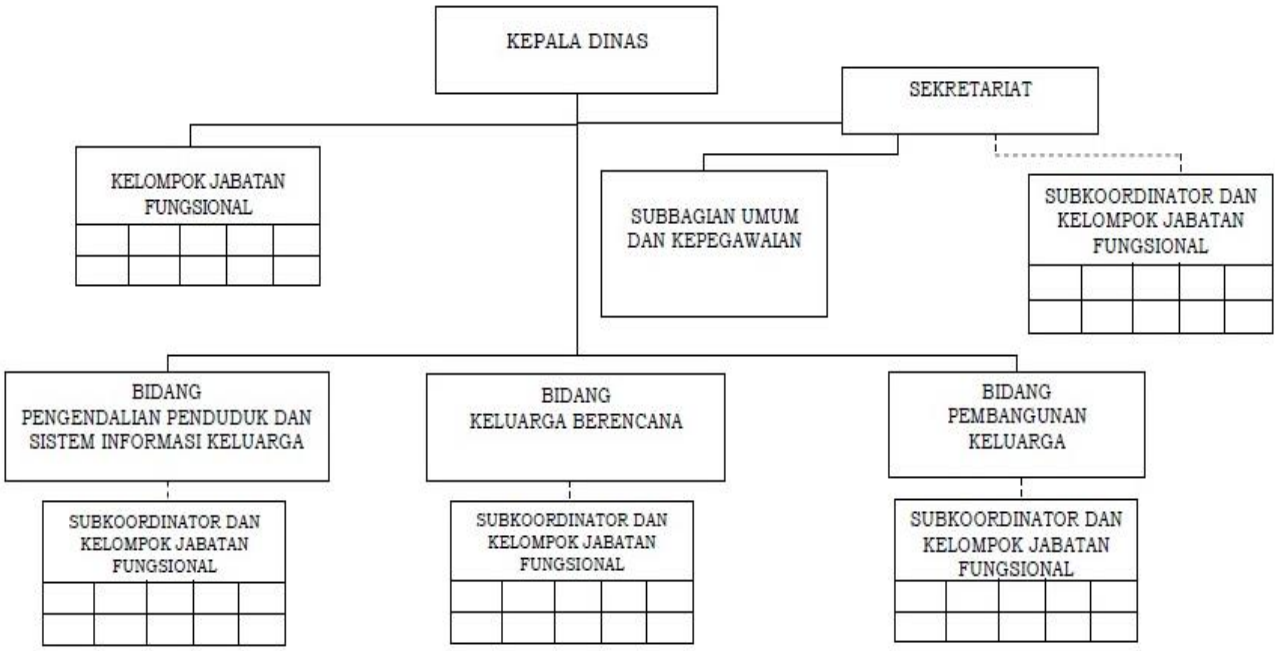
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instansi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk meliputi:

1.3.2. Sumber Daya

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi sumber daya manusia yang berasal dari lingkup pemerintah daerah dan Pendayagunaan Tenaga Fungsional Penyuluh KB dari pusat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN). Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.2
Data ASN menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Pemda	Pusat (Penyuluh KB)	
				PNS	PPPK
1.	Pengatur Muda	IIa	-	-	-
2.	Pengatur Muda Tk.I	IIb	-	-	-
3.	Pengatur	IIc	1	-	-
4.	Pengatur Tk.I	IId	3	-	-
5.	Penata Muda	IIIa	2	-	-
6.	Penata Muda Tk.I	IIIb	2	19	-
7.	Penata	IIIc	1	5	-
8.	Penata Tk.I	IIId	8	17	-
9.	Pembina	Iva	3	1	-
10.	Pembina Tk.I	IVb	1	3	-
11.	Pembina Utama Muda	IVc	1	6	-
12.	-	VII	1	-	2
13	-	IX	2	-	-
Jumlah			**25**	**51**	**2**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk masih belum mencukupi dari segi jumlah pegawai dengan beban kerja yang semakin meningkat. Dari jumlah Penyuluh KB yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk yaitu sejumlah 53, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 284 desa, setiap 1 Penyuluh KB idealnya membawahi 1 desa tetapi kondisi saat ini 1 Penyuluh KB membawahi 2 sampai 5 desa.

Berikut ini kami sajikan Data Jumlah ASN menurut jenis jabatan dan jenjang pendidikan terakhir pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk hingga akhir tahun 2024.

Tabel 1.3.2.1
Data ASN menurut Jenis Jabatan

No.	Perangkat Daerah/Kecamatan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	9	11
TOTAL PEGAWAI		**25**		

Tabel 1.3.2.2
Data ASN menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No.	Perangkat Daerah/ Kecamatan	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	4	3	12	6
TOTAL PEGAWAI		25					

1.3.3. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu :

"Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK)"

1.3.4. Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis pada Program Pengendalian Penduduk;
c. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
d. Perumusan kebijakan teknis daerah pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi Akseptor;
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang KKBPK;
g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penggerakan, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang KKBPK; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

a. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas :

memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;

5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis program pengendalian penduduk;
4. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
5. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan progam tentang pengendalian penduduk;
6. Perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data keluarga;
7. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
8. Pemantauan atas progam dan kegiatan pengendalian penduduk;
9. Perumusan kebijakan teknis yang di integrasikan melalui progam kependudukan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, menganalisis dan menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana meliputi penggerakan, Penyediaan alokon pada pelayanan kontrasepsi dan pengayoman pasca pelayanan, Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana pada program keluarga berencana;

5. Pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pendukung program keluarga berencana;
6. Penyusunan strategi program rintisan untuk pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus;
7. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
8. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah pada program pembinaan KB;
9. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Pembangunan Keluarga

Bidang Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bagi akseptor KB.

Bidang Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pada program pemberdayaan dan peningkatan KS;
3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan KS;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4. ISU-ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan, sosialisasi, dan edukasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2. Optimalisasi Kerjasama dengan BKKBN untuk mendukung penguatan SDM, Sistem Informasi dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

3. Inovasi peningkatan kepesertaan KB melalui Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah dan Lembaga terkait lainnya untuk mendukung Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
- 1.4. Isu - Isu Strategis (*Strategic Issued*);
- 1.5. Sistematika Penulisan;

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- 2.1. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja;
- 2.2. Perjanjian Kinerja;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. IKHTISAR/RINGKASAN RENSTRA/RENJA

2.1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

   Berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

   Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan.

   Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tepatnya pada Tujuan ke-2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing” serta sasaran strategis daerah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” yang dijabarkan ke dalam tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk” dengan mengintervensi Pengendalian Jumlah Kelahiran.

2. Sasaran

   Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

   Tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk”. Dijabarkan dalam sasaran “Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas”.

3. Strategi Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

Strategi pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga :
   a. Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.
   b. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal atau melalui kelompok kegiatan.
   c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam melakukan analisis/kajian kebijakan, sosialisasi dan advokasi.
   d. Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan advokasi .
   e. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
   f. Peningkatan komitmen, stakeholders tentang kependudukan.
   g. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
   h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
   i. Pengembangan dan pelaksanaan sub sistem pencatatan dan pelaporan diarahkan untuk data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat yang berbasis teknologi melalui :
      - Pembakuan sub sistem pencatatan dan pelaporan
      - Operasional pengumpulan data secara cepat, lengkap dan akurat
      - Penyusunan dan penyajian data laporan secara teratur
2) Bidang Keluarga Berencana
   a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP.
   b. Peningkatan kesertan KB Pria.
   c. Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis dan dinamis di Faskes KB pemerintah dan swasta.
   d. Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 desa terdapat 1 Faskes KB.
   e. Ketersediaan alokon di masing-masing faskes Pemerintah dan Swasta.
   f. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaan BPJS (Peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya.

g. Peningkatan kesertaan KB baru pasca persalinan dan keguguran di RS baik Pemerintah maupun Swasta.
h. Peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok Unmet need (PUS belum KB).
i. Perluasan jejaring kemitraan adanya Komite KB Mandiri, dan masyarakat peduli KB.
j. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak(KHIBA) melalui KB.
k. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan IMS, HIV dan AIDS (kondom dual protection), KAR, pelayanan IUD plus Papsmear/IVA dan penanggulangan infertilitas sekunder.
l. Pelayanan KB Medis Operasi melalui interfal di Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS.
m. Memfasilitasi integrasi lintas sektor program KKBPK di Kampung KB.

3) Bidang Pembangunan Keluarga :
a. Mempertajam segmentasi sasaran kelompok Tribina dan UPPKA.
b. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan sampai pada tahap realisasi program.
c. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi program yang mengarah pada pencapaian sasaran.
d. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh pada remaja terkait dengan program generasi berencana.
e. Pendewasaan Usia Perkawinan.
f. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera.
g. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

4. Arah Kebijakan

Strategi yang dijelaskan sebelumnya merupakan upaya serius yang akan dilakukan oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam menunjang program pemerintah pusat maupun daerah. Strategi yang tertuang tersebut merupakan runtutan secara teknis dari arah kebijakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan program dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem informasi Keluarga, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pembangunan Keluarga.

Adapun arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

a. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga ditekankan pada :
    1. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
    2. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait
    3. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan
    4. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah
b. Revitalisasi Program KB :
    1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
    2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program KKB
    3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
    4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi
    5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB
    6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan
    7. Mempertahankan total angka kelahiran (TFR) pada kisaran angka 2
    8. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
    9. Meningkatkan Pembinaan dan Kompetensi Kader KB
c. Bidang Pembangunan Keluarga ditekankan pada :
    1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung pencapaian target kelompok
    2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga
    3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk menunjang peningkatan ketahanan keluarga
    4. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini lapngan untuk menunjang program

Berikut adalah kebijakan umum pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 :

1. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB sesuai standar SOP.

4. Meningkatkan kesertaan ber KB.
5. Meningkatkan kualitas petugas KB.
6. Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas.
7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bekerjasama dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan.

2.1.2. RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dilakukan penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana Kerja merupakan penjabaran atas Rencana Strategis (RENSTRA), sehingga seluruh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dapat lebih terarah dan fokus terhadap pencapaian RENSTRA.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam tahapan perencanaan kinerja, langkah awal yang dilakukan adalah perumusan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan. Target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan Rencana Aksi Upaya Pencapaian Target/Sasaran RPJMD dan RENSTRA Tahun 2024-2026, serta dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, dengan merujuk pada Visi Misi Kepala Daerah dan kemudian di turunkan menjadi sasaran dan tujuan SKPD seperti yang tertuang diatas, maka guna tercapainya sasaran dan tujuan tersebut dibutuhkan alat ukur yang *"SMART"* agar tujuan dan sasaran strategis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat terwujud dan terlaksana secara paripurna.

Berikut ini kami tampilkan tujuan, sasaran, indicator sasaran dan target serta program dan pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
1	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Keluarga Berencana yang berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR) / Angka Kelahiran Total.	2,00 Anak
			1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.	80,05 %
			1.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,40 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.629.287.210	Sumber Dana APBD
2.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 1.019.311.620	Sumber Dana APBD
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 14.069.620.300	Sumber Dana APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 6.534.811.000	Sumber Dana APBD
TOTAL		**Rp 28.253.030.130**	

Berdasarkan matriks yang tertera diatas, dapat dijelaskan bahwa apa yang muncul di dalam perencanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan hasil *review* dari isu-isu strategis terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diakomodir dalam matriks indikator kinerja utama yang diukur pada setiap tahunnya. Dengan harapan apa yang akan dilakukan, sasaran dan targetnya dapat terpenuhi, sehingga cita-cita dari Dinas PPKB dapat terwujud.

Melihat beberapa indikator diatas, dapat kita jabarkan bahwa untuk Urusan Pengendalian Penduduk berfokus pada upaya menekan angka kelahiran melalui program KB dan untuk Urusan Keluarga Berencana berfokus pada peningkatan jumlah akseptor KB baru dan aktif dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan meningkatkan Pemberdayaan Keluarga ber-KB melalui Kelompok Kegiatan.

Berikut penjelasan tentang indikator kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

   Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFRi$$

   Dimana :

   ASFRi : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i

   i = 1 : kelompok umur 20 – 24 tahun,...., dan i = 7 untuk kelompok umur 45 – 49 tahun

   Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.

   Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \text{ x } 100\%$$

   Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk.

3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need).

   Unmet Need adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmet Need adalah pasangan yang tidak menginginkan anak lagi

dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak. Dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

Penjelasan indikator diatas merupakan Indikator Kinerja Utama yang terdapat di RENSTRA yang menjadi indikator kinerja Dinas dan Capaian dari masing-masing indikator tersebut tidak terlepas dari indikator sasaran yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026. Berikut kami tampilkan indikator sasaran pada RPJMD yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2024
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{Pt}{Po}\right)^{\frac{1}{t}} - 1\right) x100$$

Keterangan :

r : Laju Pertumbuhan Penduduk

Pt : Jumlah Penduduk tahun t

Po : Jumlah Penduduk tahun awal

t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tepatnya pada Tujuan ke-2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing” serta sasaran strategis daerah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” yang dijabarkan ke dalam tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk” dengan mengintervensi Pengendalian Jumlah Kelahiran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada setiap tahunnnya menjadi skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Adapun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk berupaya untuk mengakomodir dan merumuskan tujuan, sasaran yang kemudian diukur melalui indikator kinerja dan ditetapkan dalam sebuah target masing- masing pada tahun berjalan. Dengan terwujudnya tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pencapaian menunjukkan adanya komitmen yang besar dari Pemerintah Daerah terhadap Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75% sampai 100%	Baik
III	55% sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan : Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Sasaran : Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas

Tabel 3.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	0,35 Anak	0,69 Anak	53,62

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	1,72 Anak	116,28
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,05 %	78,24 %	97,74%
		1.3 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,40 %	10,13%	112,54%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (data 2024 belum rilis)
   - Jumlah Penduduk pada Tahun 2022 1.117.033
   - Jumlah Penduduk pada Tahun 2023 1.124.693
   - Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk 0,69
   - Target Laju Pertumbuhan Penduduk 0,35
   - Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk 53,62

Secara konseptual tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tepatnya pada Tujuan ke-2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing” serta sasaran strategis daerah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” yang dijabarkan ke dalam tujuan “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk” dengan mengintervensi Pengendalian Jumlah Kelahiran.

Jumlah Penduduk pada Tahun 2022 adalah 1.117.033, sedangkan Jumlah Penduduk pada Tahun 2023 adalah 1.124.693, sehingga capaian Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 53,62%. Laju Pertumbuhan Penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor data kependudukan yang terdiri dari beberapa kumpulan data, antara lain :

1. Data migrasi masuk
2. Data migrasi keluar
3. Jumlah kelahiran
4. Jumlah kematian

Belum tercapainya target laju pertumbuhan penduduk diantaranya disebabkan oleh :

a. Adanya peningkatan angka migrasi masuk ke Kabupaten Nganjuk.
b. Angka kelahiran yang masih cenderung meningkat karena beberapa faktor, diantaranya faktor budaya.

Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk hanya mengintervensi dari sisi Pengendalian Jumlah Kelahirannya.

2. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

- Jumlah Kelahiran	12.447
- Jumlah Wanita Usia Subur (usia 15-49)	264.879
- Realisasi *Total Fertility Rate*	1,72
- Target *Total Fertility Rate*	2,00
- Capaian *Total Fertility Rate*	116,28

Pada Tahun 2024, indikator prosentase pencapaian *Total Fertility Rate (TFR)/*Angka Kelahiran Total tercapai sebesar 116,28%. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya target TFR diantaranya yakni :

a. Banyaknya masyarakat yang makin sadar akan pentingnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi, terbukti dengan tingginya animo masyarakat pada saat pelayanan KB yang dilaksanakan DPPKB Kabupaten Nganjuk.
b. Tingkat Pendidikan masyarakat di suatu wilayah yang semakin baik mendorong keinginan mereka untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak.
c. Sosial ekonomi yang baik mendorong mereka melakukan KB untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
d. Penyuluhan dan edukasi yang dilakukan dinas PPKB pada akhirnya menggugah minat masyarakat untuk ber-KB.

3. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.
   - Jumlah Peserta KB aktif 138.630
   - Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 177.190
   - Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) 78,24 %
   - Target *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) 80,05 %
   - Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) 97,74 %

Selanjutnya untuk indikator Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2024 tercapai sebesar 97,74%. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk.

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu" (4T), yaitu :

1. Terlalu Muda : Kehamilan dibawah Usia 20 tahun
2. Terlalu Tua : Kehamilan diatas Usia 35
3. Terlalu Dekat : Jarak kehamilan kurang dari 3 tahun
4. Terlalu Banyak : Jumlah Anak yang dilahirkan lebih dari 2 anak

Sangat penting pengetahuan "4 Terlalu" bagi calon ibu ataupun pasangan suami-istri yang sedang merencanakan kehamilan. Hal ini juga merupakan upaya pencegahan untuk dapat menekan angka kematian ibu di Indonesia.

Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
2. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
3. Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.
4. Kurangnya pengetahuan pra nikah tentang kontrasepsi
5. Pasangan Usia Subur (PUS) putus KB (Drop Out) Penggunaan alat dan obat kontrasepsi

4. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need).

- Jumlah Pasangan Usia Perkawinan (PUS) yang seharusnya KB tapi belum KB — 17.948
- Jumlah Pasangan Usia Perkawinan (PUS) — 177.190
- Realisasi Unmet Need — 10,13%
- Target Unmet Need — 11,40%
- Capaian Unmet Need — 112,54%

Sedangkan untuk Indikator Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2024 tercapai sebesar 112,54%. Unmet Need adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmet Need adalah pasangan yang tidak menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak. Realisasi Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
2. Tidak ingin anak lagi
3. Ingin menunda mempunyai anak
4. Larangan penggunaan kontrasepsi (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat
5. Takut efek samping pasca Pelayanan KB
6. Terlalu tua
7. Tidak subur

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja merupakan wujud dari capaian keberhasilan dari kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan kinerja yang ada pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan. Berikut kami tampilkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022 dan 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk **(data jumlah penduduk tahun 2024 belum rilis)*	0,39%	0,38%	0,37%	0,37%	0,52%	0,66%	0,69%	0,69%
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak	1,83 Anak	1,73 Anak	1,72 Anak	1,72 Anak
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,02%	80,03%	80,04%	80,05%	78,46%	78,17 %	77,12%	78,24%
		1.3 Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti	87,00%	88,00%	89,00%		76,54%	81,29 %	43,69%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		Kelompok Kegiatan								
		1.4 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)				11,40%				10,13%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk, sayangnya data jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2024 per Januari 2025 belum rilis. Dengan masih mengacu pada penghitungan tahun lalu, Jumlah Penduduk pada Tahun 2022 adalah 1.117.033, sedangkan Jumlah Penduduk pada Tahun 2023 adalah 1.124.693 sehingga capaian Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 53,62%. Laju Pertumbuhan Penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor data kependudukan yang terdiri dari beberapa kumpulan data, antara lain :

1. Data migrasi masuk
2. Data migrasi keluar
3. Jumlah kelahiran
4. Jumlah kematian

Belum tercapainya target laju pertumbuhan penduduk diantaranya disebabkan oleh :

c. Adanya peningkatan angka migrasi masuk ke Kabupaten Nganjuk.
d. Angka kelahiran yang masih cenderung meningkat karena beberapa faktor, diantaranya faktor budaya.

Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk hanya mengintervensi dari sisi Pengendalian Jumlah Kelahirannya.

2. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sasaran TFR adalah menurunnya Angka Kelahiran Total. Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 mengalami perbaikan secara siginifikan. Dapat dikatakan bahwa Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada indikator *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total pada tahun 2021 terealisasi sebesar 1,83 Anak, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1,73 Anak, pada tahun 2023 terealisasi sebesar 1,72 Anak, dan pada tahun 2024 terealisasi 1,72 anak.

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya target TFR diantaranya yakni :

e. Banyaknya masyarakat yang makin sadar akan pentingnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi, terbukti dengan tingginya animo masyarakat pada saat pelayanan KB yang dilaksanakan DPPKB Kabupaten Nganjuk.

f. Tingkat Pendidikan masyarakat di suatu wilayah yang semakin baik mendorong keinginan mereka untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak.
g. Sosial ekonomi yang baik mendorong mereka melakukan KB untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
h. Penyuluhan dan edukasi yang dilakukan dinas PPKB pada akhirnya menggugah minat masyarakat untuk ber-KB.

3. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Pada Tahun 2021 realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi sebesar 78,46 % atau 144.924 peserta KB aktif dari 184.713 PUS. Pada Tahun 2022 realisasi capaian peserta KB aktif sebesar 78,17 % atau 141.410 peserta KB aktif dari 180.898 PUS, dan pada Tahun 2023 realisasi capaian peserta KB aktif sebesar 77,12 % atau 133.414 peserta KB aktif dari 172.989 PUS.

Dari Tahun 2021 dan 2022, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,29%, Sedangkan pada Tahun 2022 dan 2023 realisasi mengalami penurunan sebesar 1,05%, dan target yang kami tentukan pada Tahun 2023 sebesar 80,04% atau naik sebesar 0,01% dari target Tahun 2022. Di tahun 2024 realisasi capaian peserta KB aktif mencapai 78,24% atau 138.630 peserta KB aktif dari 177.190 PUS. Dibandingkan tahun 2023, realisasi pada 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Meskipun demikian, realisasi CPR belum bisa mencapai target sebesar 80,05% pada tahun 2024.

Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
2. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
3. Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.
4. Kurangnya pengetahuan pra nikah tentang kontrasepsi
5. Pasangan Usia Subur (PUS) putus KB (Drop Out) Penggunaan alat dan obat kontrasepsi

1. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need).

Untuk Indikator Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need), realisasi pada Tahun 2021 tercapai sebesar 76,54%, pada Tahun 2022 tercapai sebesar 81,29%, pada Tahun 2023 tercapai sebesar 43,69 %, sedangkan pada 2024 tercapai sebesar 112,54%. Unmet Need adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmet Need adalah pasangan yang tidak menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak. Realisasi Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :

1. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
2. Tidak ingin anak lagi
3. Ingin menunda mempunyai anak
4. Larangan penggunaan kontrasepsi (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat
5. Takut efek samping pasca Pelayanan KB
6. Terlalu tua
7. Tidak subur

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra		
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	0,35%	0,33%	0,33%
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	2,00 Anak	2,00 Anak
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,05%	80,06%	80,07%
		1.3 Prosentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(Unmet Need)*	11,40%	11,30%	11,20%

Kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan target yang akan dicapai merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Oleh sebab itu perencanaan yang baik akan berdampak pada upaya untuk mencapai sebuah realisasi yang baik. Maka, pencapaian tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan atas implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. Berikut kami gambarkan Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024-2026 dengan Target Jangka Menengah yang ada dalam RPJMD/RENSTRA :

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	0,33%	0,69%	47,83%
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	1,72 Anak	116,28%
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,07%	78,24%	97,71%
		1.3 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(Unmet Need)*	11,20%	10,13%	110,56%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2023. Download per tanggal 30 November 2024.

Tabel 3.1.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2026

No.	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PD TAHUN			REALISASI CAPAIAN TAHUN			CAPAIAN PADA TAHUN		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,00	2,00	2,00	1,72	-	-	116,28%	-	-
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,05	80,06	80,07	78,24	-	-	97,71%	-	-
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	11,40	11,30	11,20	10,13	-	-	110,56%	-	-

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.

Berdasarkan data diatas, tingkat kemajuan pada masing-masing indikator cukup terlihat. Kondisi yang membaik tersebut merupakan kesuksesan dari pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga masyarakat turut serta dalam aktivitas KB dan berpartisipasi dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi/Nasional

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk			Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur		
			2024					2024		
			Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	1,72 Anak	116,28 %	1 Menurunya Angka Kelahiran Total	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,86 Anak	Belum release	-
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,05 %	78,24%	97,74 %	2 Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,60 %	77,2 %	96,63 %
		1.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,40 %	10,13%	112,54 %		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,3%	3,9%	187,17 %

Sumber : - Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.
- Infografik Kinerja Utama Bangga Kencana : Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024.

Realisasi Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur adalah realisasi Capaian dari seluruh Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan BKKBN Pusat

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk			Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Perwakilan BKKBN Pusat		
			2024					2024		
			Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00 Anak	1,72 Anak	116,28 %	1 Menurunya Angka Kelahiran Total	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,86 Anak	Belum release	-
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,05 %	78,24%	97,74 %	2 Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63,4%	61,7 %	97,31 %
		1.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,40 %	10,13%	112,54 %		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,40%	11,1%	66,67 %

Sumber : - Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.

- Infografik Kinerja Utama Bangga Kencana : Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024

3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	53,62%	Tidak Tercapai
		Indikator Sasaran : 1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	116,28	Tercapai
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	97,74	Tidak Tercapai
		1.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	112,54	Tercapai

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.

Analisis keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan pencapaian target kinerja Tahun 2024 serta alternatif solusi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Data jumlah penduduk pada tahun 2024 per Januari 2025 belum rilis, sehingga untuk saat ini kami masih mengacu pada data tahun 2023. Laju Pertumbuhan Penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor data kependudukan yang terdiri dari : (1) Data migrasi masuk; (2) Data migrasi keluar; (3) Jumlah kelahiran; dan (4) Jumlah kematian. Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya mengintervensi dari sisi Pengendalian Jumlah Kelahirannya.

Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2023 sebesar 0,69%, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada nilai pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 sebesar 0,32 dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 ada penurunan sebesar 0,03.

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk mengendalikan jumlah kelahiran adalah sebagai berikut :

2. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total

TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sasaran TFR adalah menurunnya Angka Kelahiran Total. Adapun beberapa faktor yang mendorong tercapainya Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total antara lain :

- Berkurangnya Pernikahan dini
- Pasangan Usia Subur (PUS) menunda untuk memiliki anak
- Kesadaran akan menggunakan kontrasepsi
- Fokus Karir

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk mengendalikan jumlah kelahiran adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan KB.
- Sosialisasi mengenai Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) melalui tatap muka dan berbagai media cetak, media massa dan media luar ruang.
- Bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk membantu fasilitasi sosialisasi dan publikasi terkait Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).
- Fasilitasi Layanan KB pada faskes KB di tiap kecamatan.

3. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu" (4T), yaitu :

1. Terlalu Muda : Kehamilan dibawah Usia 20 tahun
2. Terlalu Tua : Kehamilan diatas Usia 35
3. Terlalu Dekat : Jarak kehamilan kurang dari 3 tahun
4. Terlalu Banyak : Jumlah Anak yang dilahirkan lebih dari 2 anak

Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) adalah adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan alokon dan bisa menggendalikan jumlah kelahiran Sedangkan beberapa factor yang mempengaruhi tidak tercapainya CPR antara lain :

- Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
- Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
- Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.
- Kurangnya pengetahuan pra nikah tentang kontrasepsi
- Drop Out (DO) Penggunaan alat dan obat kontrasepsi

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kesertaan ber-KB adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kepesertaan KB.
- Sosialisasi kepada akseptor Pasca Salin agar tetap memakai alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing akseptor.
- Melakukan motivasi kepada para Penyuluh KB serta Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) guna menggerakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan program KB.
- Memberikan *reward* kepada akseptor KB MOP dan MOW.

4. Prosentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Unmet Need adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmet Need adalah pasangan yang tidak menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak. Aadapun beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) atau bisa kita sebut rendahnya *unmet need*, antara lain :

1. Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB
2. Dukungan pasangan untuk melakukan KB
3. Faktor ekonomi yang menyebakan orang berminat untuk melakukan KB
4. Pergeseran budaya dan pola pikir dimana mulai meninggalkan kepercayaan yang konservatif dimana banyak anak banyak rejeki.
5. Optimalnya pembinaan kepada pasangan usia subur (PUS).

Sedangkan apabila terjadi penurunan presentase unmet need, beberapa penyebab yang mungkin terjadi diantaranya adalah :

1. Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
2. Tidak ingin anak lagi
3. Ingin menunda mempunyai anak
4. Larangan penggunaan kontrasepsi (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat
5. Takut efek samping pasca Pelayanan KB
6. Terlalu tua
7. Tidak subur

Solusi atau Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk agar tercapainya Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) adalah mengoptimalkan Pembinaan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) yang tidak ber-KB

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang tepat memang menjadi fokus bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Salah satu sumber daya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan adalah anggaran yang efisien dan efektif. Berikut kami jabarkan capaian kinerja dengan serapan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	1.1 *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	116,28%	957.141.443 (93,90%)	6,09%
		1.2 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian	97,74%	13.681.350.589 (97,24%)	2,75%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
		Kontrasepsi			
		1.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	112,54%	6.506.419.781 (99,57%)	0,43%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing Program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan memang difokuskan pada pencapaian sasaran dan kelompok sasaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Namun masih ada kinerja program yang belum maksima pada indicator kinerja Keluarga ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan capaiannya masih rendah sehingga perlu adanya upanya untuk memaksimalkan kegiatan yang menunjang indicator tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
2. Mengoptimalkan kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran.

3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan serta solusi/kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Berikut ini kami tampilkan capaian program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 :

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan**	**98,17 %**
		Indikator Sasaran : *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen
		Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22 Dokumen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	34 Dokumen
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	81 Unit
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Rumah Data Kependudukan yang terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi**	**118,64 %**
				Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	**3 Sekolah Siaga Kependudukan**
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas	9 Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
			Penduduk	Penduduk	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun	36 Laporan
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Prosentase capaian peserta KB**	**97,74%**
			Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6 Kegiatan
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan	5160 Kader
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Terwujudnya Pengendalian dan Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi	138.630 Orang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	49 Kampung KB
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**1. Prosentase keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)**	**65,32%**
				Menurunnya presentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita 25 tahun bagi pria	**220,30%**
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Kelompok Kegiatan
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
			Kesejahteraan Keluarga		

Berdasarkan tabel diatas, berikut ini analisis faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

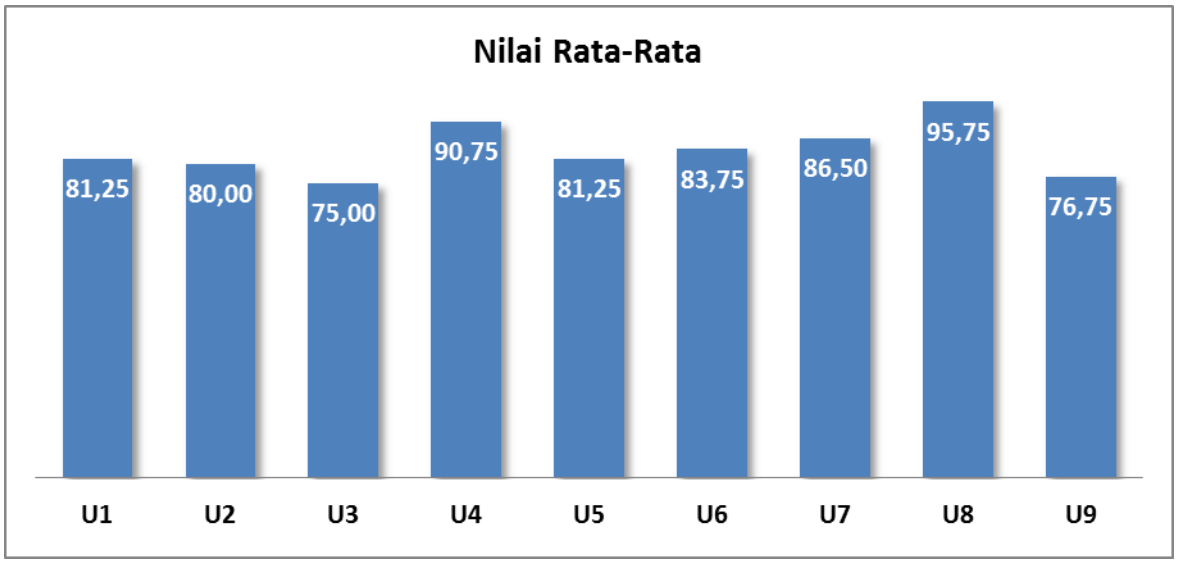
➢ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja, realisasi, target dan capaian kinerja "Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan" dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 82,00, dan telah terealisasi dengan **Nilai 80,50 Kategori "A",** maka diperoleh persentase capaian sebesar 98,17%.

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- (Nilai belum release)	98,17 %	-	-

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 :



U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

U9 : Sarana dan Prasarana

Dari ke 9 Unsur IKM diatas, posisi kinerja pelayanan terendah ada pada layanan U3 (Waktu Penyelesaian) kemudian pada U9 (Sarana dan Prasarana) dan U2 (Sistem, Mekanisme, Prosedur). Dari analisis tersebut maka diperlukan rencana tindaklanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk antara lain :

- Mempercepat pemberian layanan kepada masyarakat dalam koordinasi dan konsultasi terkait Pelayanan pada Dinas PPKB.
- Mengoptimalkan Kualitas Sarana dan Prasarana
- Memudahkan Mekanisme, Prosedur layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

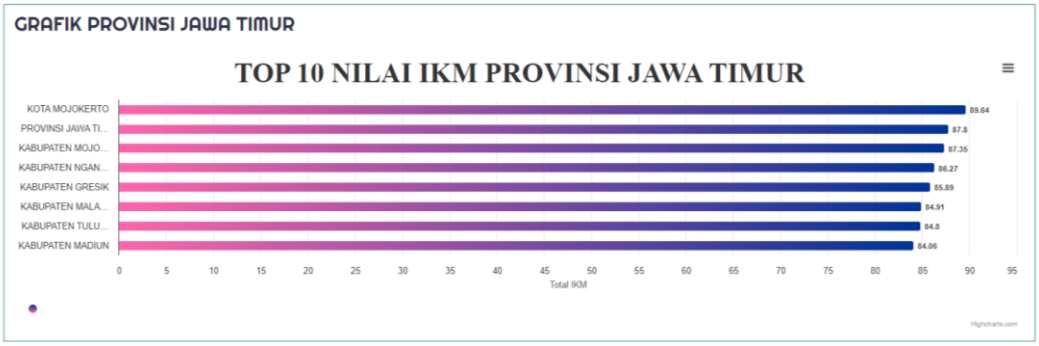
1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 7 dokumen antara lain :
    1. Dokumen Renja/Perubahan Renja
    2. Dokumen RKA/Perubahan RKA
    3. Dokumen DPA/Perubahan DPA
    4. Dokumen LKjIP
    5. Dokumen LPPD
    6. Dokumen LKPJ
    7. Dokumen SAKIP
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah 22 Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah antara lain Dokumen, administrasi Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PPKB.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu 2 Dokumen Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan biaya jasa instruktur senam bagi pegawai PPKB.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 34 Dokumen antara lain Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 36 Laporan terkait Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara sebanyak 81 unit Kendaraan Dinas Operasional, 10 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya serta 1 unit Gedung Kantor.

Realisasi Keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tergolong tinggi dengan capaian 91,05%.

Berikut ini kami sampaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut E-Sukma Jatim Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 :





Kabupaten / Kota	Nilai Rata-Rata IKM	Responden (Orang)
KOTA MALANG	90.06	4
KOTA MOJOKERTO	89.64	32364
KABUPATEN SUMENEP	89.2	378
KOTA BATU	89.14	21123
KOTA PASURUAN	88.79	15500
KABUPATEN JOMBANG	87.53	22686
KABUPATEN MOJOKERTO	87.35	51313
KABUPATEN KEDIRI	86.33	14488
KABUPATEN NGANJUK	86.27	46229
KOTA BLITAR	86.02	10924
KABUPATEN GRESIK	85.89	50958
KABUPATEN MALANG	84.91	36320
KABUPATEN TULUNGAGUNG	84.8	76191
KABUPATEN PROBOLINGGO	84.64	15441
KABUPATEN BLITAR	84.41	16357
KABUPATEN MADIUN	84.06	34225
KABUPATEN PACITAN	83.9	17691
KABUPATEN MAGETAN	83.63	365
KABUPATEN BANGKALAN	83.43	17419
KABUPATEN JEMBER	83.31	16751

- **Program Pengendalian Penduduk**

Dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja

- Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi dengan target sebesar 84,29%. Pada Triwulan III telah terealisasi 100%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 118,64%.
- Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal dengan target 3 Sekolah Siaga Kependudukan. Pada Triwulan III telah terealisasi 3 Sekolah Siaga Kependudukan, maka diperoleh persentase capaian sebesar 100%.

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	s/d Triwulan II	s/d Triwulan III	s/d Triwulan IV
1	Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi	96,61%	83,33%	118,64%	118,64%
	Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	100%	100%	100%	100%

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan keluaran Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sebanyak 3 Sub Kegiatan antara lain :
   - Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal
   - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
   - Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun yaitu sebanyak 24 Laporan, yang terdiri dari Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga serta

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Realisasi Keuangan pada Program Pengendalian Penduduk tergolong tinggi dengan capaian 93,90%.

- **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator kinerja "Persentase Peserta KB Aktif" yaitu Jumlah Peserta KB Aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Pada Tahun 2024, Jumlah Peserta KB Aktif adalah 138.630, sedangkan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 177.190, maka realisasi Persentase Peserta KB Aktif pada Tahun 2024 sebesar 78,24% dan target pada Tahun 2024 adalah 80,05%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 97,74%.

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	s/d Triwulan II	s/d Triwulan III	s/d Triwulan IV
1	Persentase Peserta KB Aktif	97,15%	95,55%	97,89%	97,74%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan keluaran Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Sub kegiatan :
   - Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
   - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
   - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
   - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
   - Pengendalian Program KKBPK.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan keluaran Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan yaitu sebanyak 5160 Kader.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran Terwujudnya Pengendalian dan Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi sebanyak 20 Kecamatan, dengan Sub kegiatan :
   - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
   - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
   - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
   - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
   - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan keluaran Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB sebanyak 49 Kampung Keluarga Berkualitas (KB).

Realisasi Keuangan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) tergolong tinggi dengan capaian 97,24%.

Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤50% pada Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP yang terealisasi sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan biaya Ayoman menyesuaikan dengan Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB. Berdasarkan realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB.

- **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

  Dalam Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator, realisasi, target dan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R) s.d Tribulan IV telah terealisasi sebesar 58,14%,

sedangkan Target pada Tahun 2024 adalah 89,01%, sehingga tercapai sebesar 65,32%

- Persentase usia Nikah Pertama dibawah usia 21 tahun, s.d Tribulan IV telah terealisasi sebesar 4,63%, sedangkan Target pada Tahun 2024 adalah 10,20%, sehingga tercapai sebesar 220,30%%

- Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	s/d Triwulan I	s/d Triwulan II	s/d Triwulan III	s/d Triwulan IV
1	Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)	63,29%	64,27%	64,36%	65,32%
2	Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	150,00%	178,63%	134,39%	220,30%

Sumber : Laporan Dalap SIGA Tahun 2024. Download per tanggal 30 November 2024.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan keluaran Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 5 Kelompok Kegiatan, yaitu (1) Bina Keluarga Balita (BKB); (2) Bina Keluarga Remaja (BKR); (3) Bina Keluarga Lansia (BKL); (4) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan (5) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Realisasi Keuangan pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) tergolong Tinggi dengan capaian 99,57%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran APBD Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024. Laporan keuangan merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Berikut ini kami sajikan Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				
2	**Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	6.629.287.210,00	6.271.409.443,00	357.877.767,00	94,60%
4	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	15.010.800,00	15.007.500,00	3.300,00	99,98%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.669.800,00	3.666.500,00	3.300,00	99,91%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.441.000,00	7.441.000,00	-	100,00%
8	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.798.046.000,00	3.570.681.075,00	227.364.925,00	94,01%
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.782.214.000,00	3.555.387.075,00	226.826.925,00	94,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.368.000,00	10.206.000,00	162.000,00	98,44%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.464.000,00	5.088.000,00	376.000,00	93,12%
12	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	193.370.000,00	190.675.000,00	2.695.000,00	98,61%

13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	193.370.000,00	190.675.000,00	2.695.000,00	98,61%
14	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	543.319.610,00	490.137.316,00	53.182.294,00	90,21%
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.113.960,00	4.036.321,00	1.077.639,00	78,93%
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.942.250,00	198.500.000,00	6.442.250,00	96,86%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.808.350,00	65.224.608,00	12.583.742,00	83,83%
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.835.050,00	25.195.700,00	1.639.350,00	93,89%
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	5.190.000,00	2.310.000,00	69,20%
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.025.000,00	6.424.000,00	601.000,00	91,44%
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.820.000,00	184.291.687,00	22.528.313,00	89,11%
22	Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.275.000,00	1.275.000,00	6.000.000,00	17,53%
23	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	677.705.000,00	647.527.003,00	30.177.997,00	95,55%
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.625.000,00	2.418.500,00	206.500,00	92,13%
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.800.000,00	84.795.608,00	7.004.392,00	92,37%
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.280.000,00	560.312.895,00	22.967.105,00	96,06%
27	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.401.835.800,00	1.357.381.549,00	44.454.251,00	96,83%
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.297.800,00	180.944.603,00	5.353.197,00	97,13%
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.150.000,00	27.855.745,00	24.294.255,00	53,41%

30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.163.388.000,00	1.148.581.201,00	14.806.799,00	98,73%
31	**Program Pengendalian Penduduk**	1.019.311.620,00	957.141.443,00	62.170.177,00	93,90%
34	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	153.504.620,00	142.791.050,00	10.713.570,00	93,02%
36	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	50.775.000,00	45.956.800,00	4.818.200,00	90,51%
37	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	53.440.000,00	49.125.200,00	4.314.800,00	91,93%
38	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	49.289.620,00	47.709.050,00	1.580.570,00	96,79%
39	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	865.807.000,00	814.350.393,00	51.456.607,00	94,06%
40	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	137.609.500,00	137.377.532,00	231.968,00	99,83%
41	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	204.600.000,00	182.500.000,00	22.100.000,00	89,20%
42	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	523.597.500,00	494.472.861,00	29.124.639,00	94,44%
44	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	14.069.620.300,00	13.681.350.589,00	388.269.711,00	97,24%

46	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	2.727.531.000,00	2.483.854.967,00	243.676.033,00	91,07%
47	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	138.947.500,00	1.052.500,00	99,25%
48	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	956.000.000,00	808.340.517,00	147.659.483,00	84,55%
49	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000,00	298.800.000,00	1.200.000,00	99,60%
50	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1.081.531.000,00	1.030.335.450,00	51.195.550,00	95,27%
51	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	207.431.500,00	42.568.500,00	82,97%
52	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	8.143.193.300,00	8.071.081.363,00	72.111.937,00	99,11%
54	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	8.143.193.300,00	8.071.081.363,00	72.111.937,00	99,11%
55	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	2.123.646.000,00	2.076.822.459,00	46.823.541,00	97,80%
56	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.225.000,00	42.465.217,00	1.759.783,00	96,02%

57	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.031.321.000,00	2.001.529.242,00	29.791.758,00	98,53%
58	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12.500.000,00	-	12.500.000,00	0,00%
60	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.600.000,00	32.828.000,00	2.772.000,00	92,21%
61	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	1.075.250.000,00	1.049.591.800,00	25.658.200,00	97,61%
62	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB	3.750.000,00	3.002.850,00	747.150,00	80,08%
63	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.071.500.000,00	1.046.588.950,00	24.911.050,00	97,68%
64	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	6.534.811.000,00	6.506.419.781,00	28.391.219,00	99,57%
70	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	1.179.811.000,00	1.151.419.781,00	28.391.219,00	97,59%
71	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	275.505.000,00	270.571.550,00	4.933.450,00	98,21%

72	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000,00	27.622.800,00	1.177.200,00	95,91%
73	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	350.500.000,00	346.641.600,00	3.858.400,00	98,90%
74	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	297.920.000,00	2.080.000,00	99,31%
75	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	225.006.000,00	208.663.831,00	16.342.169,00	92,74%
77	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	5.355.000.000,00	5.355.000.000,00	-	100,00%
78	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	-	100,00%

79	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	2.805.000.000,00	2.805.000.000,00	-	100,00%
	JUMLAH	**28.253.030.130,00**	**27.416.321.256,00**	**836.708.874,00**	**97,04%**

Persentase Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebesar 97,04%. Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤50% pada Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP terealisasi sebesar 0,00%. Hal tersebut dikarenakan biaya Ayoman menyesuaikan dengan Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB. Berdasarkan realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada Akseptor yang mengalami kegagalan pasca pelayanan KB.

Adapun beberapa Penghargaan dan Prestasi yang dicapai oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024, antara lain :

NO	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TINGKAT PRESTASI	PENYELENGGARA	DOKUMENTASI
1.	Terbaik I Pelayanan KB Sejuta Akseptor (Persentase Capaian Total Pelayanan KB Tertinggi) 265,10% Nganjuk	Provinsi	BKKBN	  

NO	PENGHARGAAN/ PRESTASI	TINGKAT PRESTASI	PENYELENGGARA	DOKUMENTASI
2.	Juara Harapan II Penyuluh KB ASN Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik	Provinsi	BKKBN	

BAB IV
PENUTUP

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk telah mampu untuk melakukan pencapaian sasaran, baik dari Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga, Bidang Keluarga Berencana maupun Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pencapaian sasaran "Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas" pada tahun 2024 diukur oleh beberapa indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total Tahun 2024 terealisasi sebesar 1,72 Anak dan tercapai 116,28%. (mengacu pada data tahun 2023, untuk tahun 2024 belum rilis)
2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2024 terealisasi sebesar 78,24% dan tercapai 97,74%.
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) terelaisasi sebesar 10,13% dan tercapai 112,54%.

Upaya-upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja Dinas PPKB pada tahun tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan personil penyuluh keluarga berencana yang ada.
2. Menyajikan Data Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang akurat.
3. Melakukan motivasi kepada para Penyuluh KB serta kader KB guna menggerakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan keberhasilan program KB.
4. Mengoptimalkan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas disetiap kecamatan bersama lintas sektoral.
5. Meningkatkan Kepesertaan KB MKJP.
6. Memberikan *reward* kepada akseptor KB MOP dan MOW.
7. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi.

8. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada Remaja melalui Kegiatan Roadshow GenRe Millenial.
9. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi dan kualitas hidup keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA).
10. Peningkatan sinergitas dan dukungan Percepatan Penurunan Stunting dengan pihak ketiga.
11. Optimalisasi dan integrasi Sistem Satu Data untuk data Stunting dengan Lintas Sektor.
12. Optimalisasi pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk meminimalisir terjadinya Stunting baru pada Balita.

Demikian LKJIP ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.